

**SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA**  
**DALAM PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN**  
**PEKERJAAN**



Diajukan oleh

**ASTRIANI**

**NIM. 2110211120063**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Februari 2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM  
PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**ASTRIANI**

**NIM. 2110211120063**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Februari 2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA**  
**DALAM PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN**  
**PEKERJAAN**

Diajukan oleh

**ASTRIANI**

**NIM. 2110211120063**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Senin 13  
Januari 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Diketahui

Banjarmasin, 10 Februari 2025

Ketua Program,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

...

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA**  
**DALAM PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN**  
**PEKERJAAN**

Diajukan oleh

**ASTRIANI**

**NIM. 2110211120063**


Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

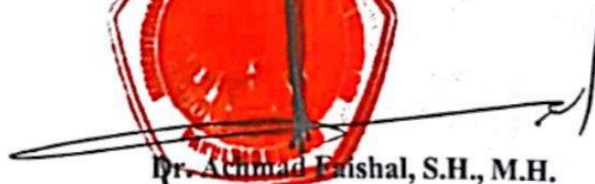
Nomor : 085/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 17 MAR 2025

Disahkan

Dekan,





**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari senin 13 Januari 2025 dengan susunan Panitia penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Rahmat Budiman, S.H., LL.M

Sekretaris/Anggota : Muhammad Yusman, S.H., M.H

Anggota : Dr. Saprudin S.H., LL.M.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 116/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 13 Januari 2025

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Astriani  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211120063  
Tempat/Tanggal Lahir : Wonosobo, 10 Maret 2003  
Program Kekhususan : Hukum Bisnis  
Bagian Hukum : Hukum Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 10 Februari 2025

Yang membuat pernyataan,



NIM. 2110211120063

## **MOTO**

*TALK LESS, ACT MORE*

(A 2024)

## **PERSEMBAHAN**

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

**Ayahanda dan ibunda terkasih,**

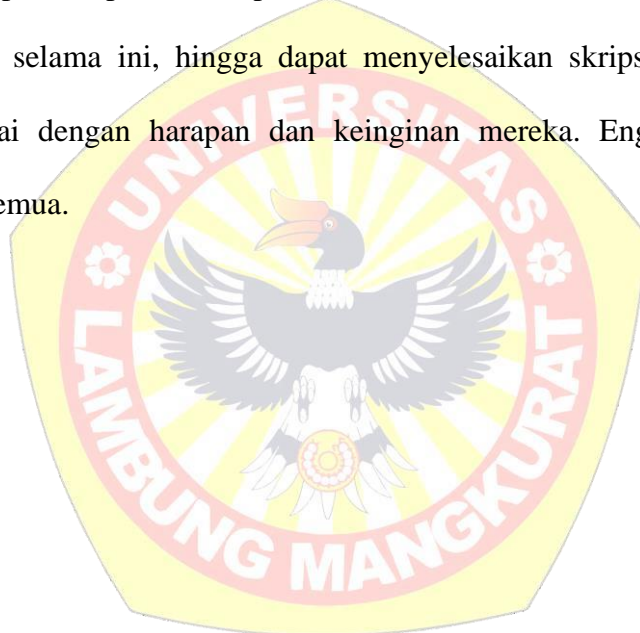
Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orangtua bapak dan mama **Sabar Setiadi dan Murtini (alm)**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang soleha dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebijakan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga bapak dan mama selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat bapak dan mama berdua.

### **Kakakku tersayang,**

Diucapkan terimakasih kepada kakakku **Fitriyana dan Hasanuddin**, atas dorongan, semangat, dan bantuan finansialnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga kalian menjadi keluarga yang Bahagia.

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M. atas bantuan, bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.



## RINGKASAN

Astriani. Februari 2025. **PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA DALAM PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 halaman. Pembimbing Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Kehilangan pekerjaan merupakan situasi yang dapat memberikan dampak pada pemenuhan hak dasar sosial ekonomi seseorang pekerja/buruh terutama pada lingkungan tempat tinggal dan masyarakat pada umumnya. Kehilangan pekerjaan terjadi karena adanya pemutusan hubungan kerja yang dialami oleh pekerja/buruh. Pemerintah berkewajiban memberikan Jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak. Program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) merupakan salah satu program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan yang dibuat oleh pemerintah sesuai dengan amanat undang-undang Cipta Kerja. Program JKP memberikan perlindungan secara khusus kepada pekerja/buruh yang mengalami kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja dengan memberikan tiga manfaat yaitu, manfaat uang tunai, manfaat akses informasi pasar kerja, dan manfaat pelatihan kerja. Namun didalam pelaksanaannya program ini masih banyak pekerja/buruh yang belum mendapatkan manfaat program. Tidak terpenuhinya syarat kepesertaan pekerja/buruh dalam program ini menjadi salah satu faktor pekerja/buruh belum bisa mendapatkan perlindungan dalam program JKP. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu ditelaah Kembali tentang perlindungan dalam program JKP dan syarat kepesertaan yang ada apakah sudah tepat dengan kondisi pekerja/buruh saat ini.

Tujuan penelitian untuk mengetahui apa yang menjadi dasar penentuan syarat kepesertaan untuk mendapatkan manfaat dan perlindungan yang didapatkan dalam program jaminan kehilangan pekerjaan BPJS Ketenagakerjaan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan tipe penelitian sistematika hukum yaitu, penelitian mengkhususkan terhadap bahan hukum

primer dan bahan sekunder yang menggunakan pengertian dasar hak dan kewajiban, dalam sistem hukum sebagai kerangka acuannya. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif analisis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui wawancara dan studi pustaka. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisis teks/isi berdasarkan logika dan argumentasi hukum.

Mengenai syarat ketentuan pada Pasal 19 ayat (3) PP Nomor 37 Tahun 2021 bila yang ditelusuri lebih lanjut merupakan mekanisme yang cukup strategis mengingat jangka waktu yang menjadi batas minimum sudah relevan untuk saat ini. Langkah ini juga merupakan sebuah cara untuk menjaga keberlanjutan program dalam jangka Panjang. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan juga memberikan perlindungan yang sangat jelas mengenai pekerja/buruh yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat dalam program ini merupakan tanggung jawab pemberi kerja/pengusaha.

Pengusaha yang tidak mengikut sertakan pekerja/buruh dalam program jaminan kehilangan pekerjaan dan terjadi pemutusan hubungan kerja maka pengusaha wajib memenuhi hak pekerja/buruh berupa manfaat yang setara dengan manfaat program jaminan kehilangan pekerjaan.

Astriani. Februari 2025. **PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA DALAM PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 halaman. Pembimbing Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

### **ABSTRAK**

Pandemi Covid-19 merupakan krisis global yang menyebabkan perlambatan ekonomi di Indonesia, berdampak signifikan pada sektor ketenagakerjaan dengan meningkatnya jumlah pekerja/buruh yang mengalami PHK. Sebagai respons, pemerintah menyediakan perlindungan sosial melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Namun, Kemenaker mencatat bahwa banyak pekerja/buruh belum menerima manfaat program ini.

Penelitian ini membahas syarat dan perlindungan hukum yang diperlukan agar pekerja dapat mengakses manfaat JKP. Pasal 19 ayat (3) PP Nomor 37 Tahun 2021 menetapkan masa kepesertaan dan iuran minimal sebagai syarat utama untuk memperoleh manfaat JKP. Ketentuan ini bertujuan mengurangi dampak negatif bagi pekerja, pemerintah, dan keberlanjutan program, sekaligus mencerminkan kontribusi aktif serta solidaritas peserta. Program JKP memberikan manfaat berupa uang tunai, akses informasi kerja, dan pelatihan, yang membantu pekerja/buruh mempertahankan kehidupan yang layak selama masa transisi.

**Kata kunci:** BPJS Ketenagakerjaan; JKP; Perlindungan Hukum.

## UCAPAN TERIMAKASIH

*Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu, Alhamdulillah rabbil alamin.* Penulis mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Oleh karena itu, disusun skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN**

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik, tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat Bapak Dr. Achmad Faishal S.H., M.H. Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh pimpinan.

2. Yang terhormat Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Yang terhormat Bapak Dr. Saprudin S.H., LL.M. sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan sampai penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. Yang terhormat Bapak Deden Koswara, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing akademik selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Yang terhormat Bapak Rahmat Budiman, S.H., LL.M dan Bapak Muhammad Yusman, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum khususnya dosen program kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh Pendidikan.
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik selama penulis menjadi mahasiswa.
8. Seluruh keluarga besar LP2DH FH ULM yang telah memberikan semangat, motivasi, dan memberikan banyak pengalaman kepada penulis di masa perkuliahan.

9. Kepada Andi Afdal Givar Ramadhan yang telah memberikan semangat, dorongan, dan motivasi kepada penulis selama menempuh Pendidikan.
10. Kepada seluruh sahabat- sahabat penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu menghibur, membantu, memberi semangat, dan dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaanya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL LUAR.....</b>   | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....</b>  | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>   | <b>iii</b>  |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>   | <b>iv</b>   |
| <b>SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....</b>  | <b>v</b>    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>  | <b>vi</b>   |
| <b>MOTO .....</b>   | <b>vii</b>  |
| <b>RINGKASAN.....</b>   | <b>ix</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>   | <b>xi</b>   |
| <b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>  | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>xv</b>   |
| <b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>   | <b>xvii</b> |
| <b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>   | <b>xix</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>  | <b>xx</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....  | 8           |
| C. Keaslian Penelitian .....  | 8           |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....   | 9           |
| E. Metode Penelitian .....  | 11          |
| F. Sistematika Penulisan .....  | 15          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>   | <b>16</b>   |
| A. Tinjauan Tentang Perlindungan hukum<br>ketenagakerjaan.....                              | 16          |
| B. Tinjauan Tentang Ketenagakerjaan .....   | 17          |
| 1. Pengertian pekerja/buruh.....  | 17          |
| 2. Hubungan kerja .....   | 18          |
| 3. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).....  | 20          |
| 4. Hak dan kewajiban pekerja/buruh.....   | 23          |
| C. Tinjauan Tentang Badan penyelenggara jaminan<br>sosial ketenagakerjaan di Indonesia..... | 24          |
| 1. Sejarah dan pengertian BPJS Ketenagakerjaan.....   | 24          |

|  |           |
|--|-----------|
| 2. Jaminan sosial .....  | 25        |
| <b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>   | <b>31</b> |
| A. Yang mendasari ketentuan pasal 19 ayat (3)<br>peraturan pemerintah Nomor 37 tahun 2021<br>tentang Penyelenggaraan Program Jaminan<br>Kehilangan Pekerjaan ..... | 31        |
| B. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja dalam<br>Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. ....   | 42        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>  | <b>60</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 60        |
| B. Saran.....  | 62        |
| <b>DAFTAR RUJUKAN</b>  |           |
| <b>RIWAYAT HIDUP</b>   |           |



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), waktu kerja dan istirahat, alih daya, serta PHK.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta Dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran Dalam Program JKP

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat JKP

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Awal dan Akumulasi Iuran Program JKP.



## DAFTAR SINGKATAN

|         |   |
|---------|---|
| UUD     | = Undang-Undang Dasar                   |
| BPJS    | = Badan Penyelenggara Jaminan Sosial    |
| PKWT    | = Perjanjian Kerja Waktu Tertentu       |
| PKWTT   | = Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu |
| JKK     | = Jaminan Kecelakaan Kerja              |
| JHT     | = Jaminan Hari Tua                      |
| JP      | = Jaminan Pensiun                       |
| JKM     | = Jaminan Kematian                      |
| JKP     | = Jaminan Kehilangan Pekerjaan          |
| KBBI    | = Kamus Besar Bahasa Indonesia          |
| LPK     | = Lembaga Pelatihan Kerja               |
| UU SJSN | = Undang-Undang Jaminan Sosial Nasional |
| PP      | = Peraturan Pemerintah                  |
| KUHPer  | = Kitab Undang-Undang Hukum Perdata     |



## DAFTAR TABEL

|           |  |    |
|-----------|--|----|
| Tabel 3.1 | : Perbandingan Program BPJS Ketenagakerjaan..... | 46 |
| Tabel 3.2 | : Simulasi Perhitungan Manfaat Uang Tunai.....   | 53 |

